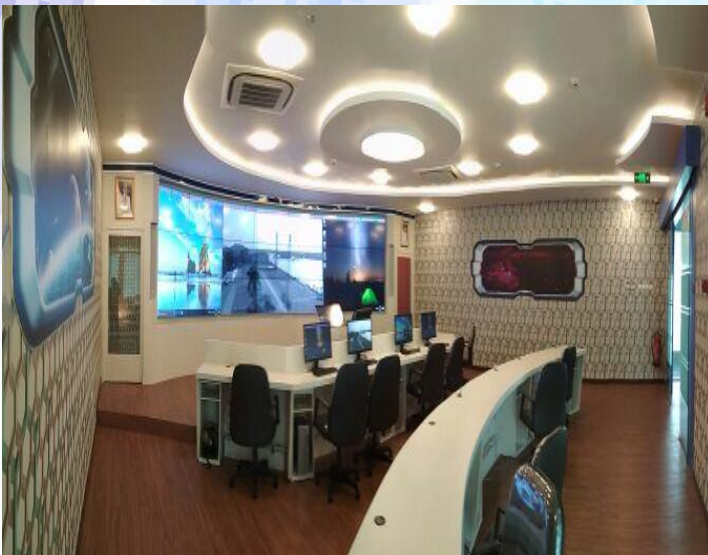


**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Nyoman Ratu No.1271 Palembang
Website : www.palembang.go.id



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TAHUN 2024–2026**



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) awal Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun sebagai dasar unsur Penyelenggara Negara untuk menyusun pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya untuk mencapai kinerja dan hasil kerja untuk mendukung Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

Renstra Diskominfo Kota Palembang Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa penjabaran operasional dan teknis dari Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang diuraikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2026.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa akan memberikan taufik dan hidayah-Nya serta Perlindungan-Nya bagi Kita, Aamiin.

Palembang, Februari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang**


H. Edison, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 199815081990091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMABARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo	14
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15
3.1 Identifikasi Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota	16
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumsel	17
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	23
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	26

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB VIII PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai PNS Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	11
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non PNSD Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	12
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai PNS Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Berdasarkan golongan	12
Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	15
Tabel 2.6 Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	15
Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan dan Program	27
Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika	8

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap Kepala Daerah harus mempunyai Visi dan Misi dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sehingga diperlukan rencana-rencana strategis. Rencana strategis tersebut haruslah terukur dan berkesinambungan dan mendukung program pemerintah yang lebih tinggi. Rencana strategis dimulai dengan melihat Visi dan Misi Walikota Palembang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas/Badan/Kantor/ adalah termasuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kapasitas sebagai pengguna anggaran yang wajib menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Rencana Strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (1-5 tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat suatu rencana strategis yang akan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2026, dan pada saat ini Kota Palembang sedang melaksanakan RPJMD tahun 2018-2023, sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada

Tahun 2023. Secara garis besar proses penyusunan Renstra Diskominfo dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palembang merupakan lembaga Unsur SKPD Pemerintah Daerah yang mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kota Palembang tahun 2024-2026 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
- 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
- 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM
- 3.3. TELAAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 3.4. TELAAH RTRW DAN KLHS
- 3.5. PENENTUAN ISU

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

4.2. SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

5.2. ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

6.1. PROGRAM

6.2. KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merupakan lembaga unsur OPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas komunikasi dan Informatika Kota Palembang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

A. TUGAS:

“ Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. “

B. FUNGSI :

1. Memimpin kegiatan dinas dan urusan kesekretarian serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
2. Penyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis Dinas.

3. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi; Pengelolaan e-Government; Teknologi Informasi, Persandian dan Statistik; Pengelolaan Komunikasi Publik; dan Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik.
4. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
5. Pelaksanaan Komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur pemerintah kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Evaluasi dan Pelaporan.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

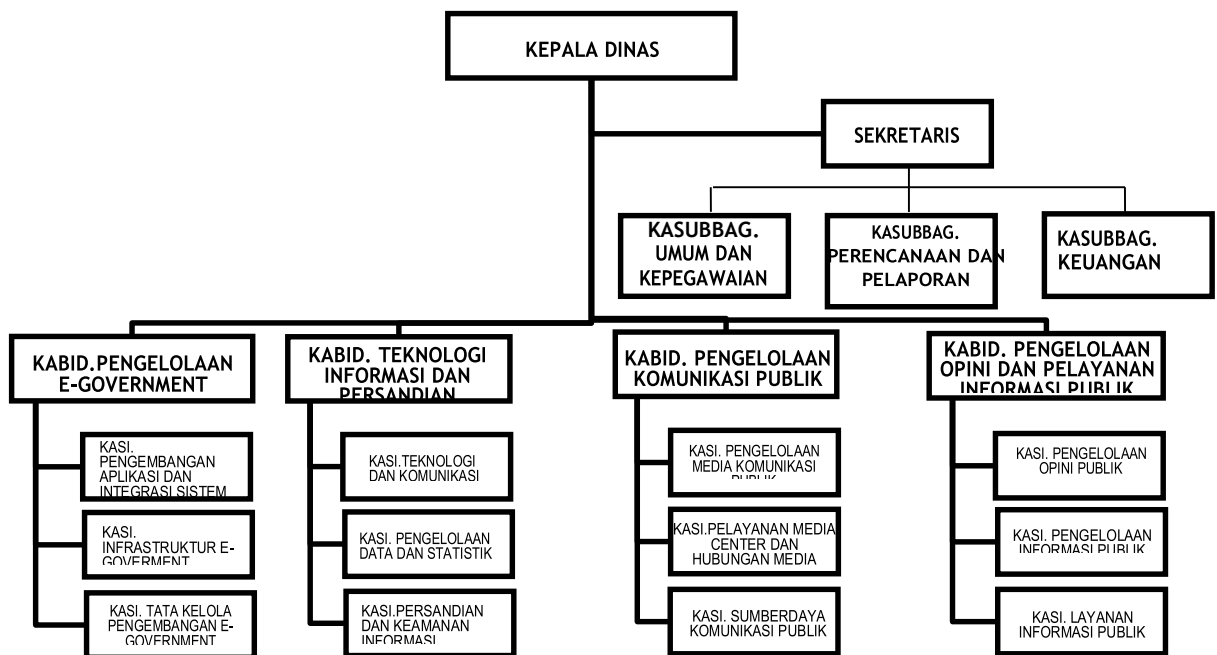
C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang terdiri dari : Satu Orang Kepala Dinas, Satu Orang Sekretaris, Empat Orang Kabid, serta 15 Orang Kepala Seksi. Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik
 - a. Kasi Pengelolaan Opini Publik

- b. Kasi Pengelolaan Informasi Publik
- c. Kasi Layanan Informasi Publik
- 4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
 - a. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Kasi Pelayanan Media Center dan Hubungan Media
 - c. Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik
- 5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
 - a. Kasi Teknologi dan Komunikasi
 - b. Kasi Pengelolaan Data dan Statistik
 - c. Kasi Persandian dan Keamanan Informasi
- 6. Kepala Bidang Pengelolaan E-Government
 - a. Kasi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi
 - b. Kasi Infrastruktur E-Government
 - c. Kasi Tata Kelola Pengembangan E-Government.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota P alembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, pengelolaan e-government, teknologi informasi dan persandian, pengelolaan komunikasi publik serta pengelolaan opini dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Sekretariat

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan dan kepegawaian serta rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat

mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
- Penyelenggaraan Administrasi perkantoran yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

C. Bidang Pengelolaan E-Government

Mempunyai tugas / kegiatan :

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

D. Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian

Mempunyai tugas / kegiatan :

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

E. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Mempunyai tugas / kegiatan :

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

F. Bidang Pengelolaan Opini Dan Pelayanan Informasi Publik

Mempunyai tugas / kegiatan :

- Penyebarluasaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- Penyebarluasaan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

D. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sumber daya Aparatur

Sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tercatat sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah 47 orang pegawai negeri sipil dan 55 orang Pegawai Non PNSD. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2022

No	Sub SKPD	JML	Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin		
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	L	P	
1	Kepala Dinas	1						1	1		
2	Bidang Sekretariat	13	-	1	2	-	7	3	8	5	
3	Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik	7	-				1	2	4	6	1
4	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	10			1	2	4	3	6	4	
5	Bindang Teknologi Informasi dan Persandian	8				3	3	2	5	3	
6	Bidang Pengelolaan E- Government	8				2	4	2	3	5	
Jumlah		47		1	3	8	20	15	29	18	

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Non PNS Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
KotaPalembang, Menurut Tingkat Pendidikan Formal Dan Jenis Kelamin
Per Desember 2022

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan						JK	
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	L	P
1	Kepala Dinas		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bidang Sekretariat	17	-	-	5	2	9	1	8	9
3	Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik	6	-	-	3	1	2	-	4	2
4	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	20	-	-	6	2	12	-	18	2
5	Bidang Teknologi Informasi dan Persandian	4	-	-	-	-	4	-	2	2
6	Bidang Pengelolaan E-Government	8	-	-	4	1	3	-	2	6
Jumlah		55	0	0	18	6	30	1	34	21

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2022

No	Sub SKPD	Jml	Pangkat/gol.				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1	Kepala Dinas	1				-			1
2	Bidang Sekretariat	13		2	7	-	3	1	
3	Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik	7			2	1	3	1	

4	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	10		1	6	-	3	1	
5	Bidang Teknologi Informasi dan Persandian	8		2	1	-	3	1	
6	Bidang Pengelolaan E-Government	8		2	3	-	2	1	
Jumlah		47		7	19	1	14	5	1

1. Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada table berikut:

Tabel 2.5

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Gedung Kantor	2	unit	✓		
2	Rumah Dinas	1	unit	✓		
3	Gudang	1	unit	✓		
4	Musholah	1	unit	✓		
5	Tempat Parkir	1	unit	✓		
6	Kendaraan Roda Empat	11	unit	✓		
7	Kendaraan Roda Dua	21	unit	✓		
8	Personal Computer	50	unit	✓		
9	Printer	30	unit	✓		
10	Meja Kerja eselon II	1	unit	✓		
11	Meja Kerja eselon III	5	unit	✓		
12	Meja Kerja eselon IV	15	unit	✓		
13	Meja Kerja Staf	50	unit	✓		
14	Kursi Kerja Eselon II	1	unit	✓		
15	Kursi Kerja Eselon III	5	unit	✓		
16	Kursi Kerja Eselon IV	15	unit	✓		
17	Kursi Kerja Staf	60	unit	✓		
18	Lemari Arsip	20	unit	✓		
19	AC Split	37	unit	✓		
20	AC Unit	4	unit	✓		

2.2. Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2024-2026 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Target Kinerja Diskominfo Kota Palembang 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Opini dan	80 Indeks	80.5 Indeks	11570.111.050,00	810 Indeks	12.727.122.155,00	815 Indeks	13.999.834.371,00	815 Indeks	13.999.834.371,00	
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	82.5 Indeks	82.7 Indeks		82.9 Indeks		83.2 Indeks		83.2 Indeks		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Keamanan dan Teknologi	90 Indeks	91 Indeks	9.080.847.000,00	92 Indeks	9.988.931.700,00	93 Indeks	10.987.824.870,00	93 Indeks	10.987.824.870,00	
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2.66 Indeks	2.70 Indeks		2.74 Indeks		2.78 Indeks		2.78 Indeks		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penerapan Satu Data	0%	20%	3.227.319.000,00	40%	3.550.050.900,00	60%	3.905.055.990,00	60%	3.905.055.990,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.4.2	372 Indeks	329 Indeks	1.523.565.000,00	331 Indeks	1.675.921.500,00	333 Indeks	1.799.513.650,00	333 Indeks	1.799.513.650,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Kominfo Kota	75 Indeks	76 Indeks	15.534.669.871,00	77 Indeks	15.530.526.551,00	78 Indeks	17.179.068.837,00	78 Indeks	17.179.068.837,00	
		Nilai SAKIP	BB Nilai	BB Nilai		BB Nilai		A Nilai		A Nilai		
			TOTAL:		40.936.511.921,00		43.472.552.806,00		47.871.297.718,00		47.871.297.718,00	

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan proyeksi target kinerja sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)													
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG													
No	IKD	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2021			2022			2023			PD PENANGGUNG JAWAB
I	2	4	5	6			7			8			9
				T	R	C	T	R	C	T	R	Proyeksi Capaian	
1	Indeks Keterbukaan Informasi Pembangunan (melalui survey Kepuasan Masyarakat)	%	70	80	80	100	83	80	100,0	85		100	Dinas Kominfo
2	Jumlah Sistem e-Gov yang Terintegrasi	Sistem	6	30	15	50	32	17	53,12	35		0	Dinas Kominfo
3	Persentase OPD yang Terhubung Jaringan e-Gov	%	100	100	100	100,00	100	100	100,0	100		100,00	Dinas Kominfo
4	Rata-rata Kecepatan Jaringan e-Gov	%	Mbps	50-200 Mbps	1000	500,00	50-250 Mbps	1000	400,0	50-300 Mbps		100,00	Dinas Kominfo
5	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,9	3,05	2,66	87,21	3,1	2,66	85,8	3,15		100	Dinas Kominfo

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (*Threats*) yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan (Threats):

- a) Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- b) Pengelolaan Website Pemerintah Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang terintegrasi dan terupdate;
- c) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan transparan;
- d) Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana komunikasi;
- e) Keamanan system informasi yang belum maksimal;

Peluang-peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :

2. Peluang (Opportunities):

- a) Peningkatan kapasitas SDM dibidang TIK dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi yang ada maupun yang akan dibangun;
- b) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat /pendidikan formal bagi Aparatur;
- c) Adanya perkembangan jaringan informasi yang beroperasi di wilayah Kota Palembang;
- d) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik;
- e) Dukungan dari Instansi dalam tugas tugas Pemerintahan;
- f) Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Masih terbatasnya SDM di bidang Komunikasi dan Informasi;
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan;
3. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sectoral;
4. Belum standarnya Pelayanan Operasional Prosedur;
5. Terbatasnya anggaran kegiatan pelaksanaan program.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Untuk tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Palembang mempunyai sasaran dan prioritas pembangunan yaitu, tahun 2024 “Optimalisasi Kinerja Pemerintahan sebagai Penyokong Perekonomian Daerah yang Berdikari”. Tahun 2025 “Palembang sebagai Kota Jasa yang berkualitas, Mandiri dan Berbudaya”. Tahun 2026 “Pembangunan Sumber Daya Manusia guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata”

Arah sasaran dan prioritas pembangunan tersebut dapat dijabarkan pada uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;

3. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan;
4. Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Percepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan ketentraman/ketertiban umum.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang harus diselaraskan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Juga disesuaikan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Telaah ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, perpaduan, sinkronisasi dan sinergitas sesuai dengan bidang urusan yang menjadi wewenang serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Sasaran prioritas pembangunan tahun 2024:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.
 - Peningkatan produktivitas lapangan usaha;
 - Pengembangan potensi wisata unggulan daerah;
 - Optimalisasi kajian / penelitian pengembangan sector ekonomi unggulan daerah;
 - Memberikan kemudahan berinvestasi;
 - Pengembangan kewirausahaan pelaku UMKM dan koperasi;
 - Fasilitas pemasaran produk unggulan serta mengoptimalkan pasar tradisional dan pasar modern;
 - Penguatan pengelolaan stok dan ketersediaan pangan.
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
 - Penguatan sistem jaminan perlindungan dan rehabilitasi social;
 - Mempercepat pelaksanaan verifikasi data penerima perlindungan social;
 - Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan dasar;
 - Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin.

3. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
 - Peningkatan kualitas pelayanan dan akses terhadap fasilitas Pendidikan;
 - Peningkatan kompetensi tenaga pendidik/kependidikan;
 - Peningkatan kualitas pelayanan dan akses terhadap fasilitas kesehatan;
 - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan.
 - Peningkatan konektivitas wilayah, kualitas jalan/jembatan dan revitalisasi fungsi badan jalan;
 - Optimalisasi penerapan sistem transportasi antar moda;
 - Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni dan terjangkau (MBR);
 - Optimalisasi penataan permukiman kumuh.
 - Penguatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
5. Pecepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan ketentraman / ketertiban umum.
 - Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
 - Optimalisasi dan diserfikasi sumber-sumber Pendapatan Asli daerah;
 - Digitalisasi tata kelola kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik;
 - Peningkatan ketentraman dan ketertiban.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

- Peningkatan jangkauan dan pelayanan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- Mempertahankan dan mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;

- Peningkatan kerjasama antar sistem jaringan telekomunikasi;
- Penggunaan fasilitas telekomunikasi.

Adapun penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi:

1. Struktur tata ruang saat ini;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang; dan
5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.

memberikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas – tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan. Maka Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palembang melaksanakan sebagian urusan pemerintah sesuai dengan bidang dan tugas – tugasnya, mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya, penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Selaku Satuan Kerja Tingkat Daerah (SKPD) tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang adalah membantu Walikota Dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dibidang komunikasi dan Informatika. Merumuskan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi kesekretariatan, diseminasi informasi publik, pemberdayaan telematika, pos dan telekomunikasi, Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah sesuai dengan bidang tugas-

tugasnya; Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atau pelaksanaan tugasnya, Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan kompetensi serta sarana dan prasarana infrastruktur guna menuju Palembang Smart City dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan .Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kab/Kota dan **Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008** Tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang bahwa bidang Komunikasi Dan informatika mempunyai kedudukan, Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

a. Kedudukan

- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang adalah unsur pelaksana urusan daerah dibidang Komunikasi dan informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

b. Tugas

Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas tugas pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika.

c. Wewenang

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas komunikasi Dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan **Peraturan Walikota Palembang No.18 Tahun 2008** untuk bidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan kewenangan pemerintahan Kota Palembang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: :

- a. Bidang Pos Dan Telekomunikasi meliputi;
1. Penyelenggaraan pelayanan pos

2. Pemberian Rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
 3. Pemberian Izin Jasa Titipan untuk kantor agen
 4. Penertiban Jasa titipan untuk kantor agen
- b. Bidang Telekomunikasi
1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan.
 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
 4. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
 5. Pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan Wartel, Warung seluler atau sejenisnya.
 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
- c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit(Orsat)
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satukota.
 3. Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (OrdonansiGangguan).
 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
 5. Pemberian izin instalansi genset.

Adapun Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sektor jasa dalam peningkatan daya saing perekonomian daerah;
 2. Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem;
 3. Optimalisasi TIK dalam mengembangkan layanan pendidikan dan kesehatan;
 4. Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pembangunan berkelanjutan;
 5. Transformasi digitalisasi dalam berbagai bidang dan aspek pembangunan;
 6. Akselerasi pencapaian Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
- Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan Merupakan kondisi atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, melaksanakan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yaitu implementasi dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang sesuai RPJMD Kota Palembang Tahun 2024-2026 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Informasi Pembangunan.
3. Mewujudkan Palembang Smart City.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Palembang 2024-2026, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD.
2. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Pembangunan.
3. Terimplementasinya E-Government.

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

4.1.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2019-2023, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

- 2.1.1.1 Strategi mengoptimalkan kinerja pelayanan PD
- 2.1.1.2 Strategi mengoptimalkan media center sebagai sarana untuk melakukan penyebarluasan informasi, kerjasama informasi dengan mass media dan pengelolaan opini dan komunikasi publik.
- 2.1.1.3 Strategi pengembangan komunikasi dan informasi serta

pelayanan administrasi daerah berbasis TIK.

b. Kebijakan

2.1.1.1.1 Arah kebijakan melakukan pembinaan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, SDM dan sistem laporan pencapaian kinerja keuangan.

2.2.1.1.1 Arah kebijakan melakukan pembinaan di bidang penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

2.3.1.1.1 Arah kebijakan melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan, sumberdaya, dan sistem informasi berbasis TIK.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa : Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Walikota yang selaras dengan strategi dan kebijakan Daerah serta rencana program prioritas sesuai dengan RPJMD Kota Palembang. Strategi Diskominfo Kota Palembang yaitu :

1. Strategi mengoptimalkan kinerja pelayanan PD.
2. Strategi mengoptimalkan media center sebagai sarana untuk melakukan penyebaran informasi, kerjasama informasi dengan mass media dan pengelolaan opini dan komunikasi publik.
3. Strategi pengembangan komunikasi dan informasi serta pelayanan administrasi daerah berbasis TIK.

Adapun Arah kebijakan Diskominfo yaitu :

1. Melakukan pembinaan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, SDM

dan sistem laporan pencapaian kinerja keuangan.

2. Arah kebijakan melakukan pembinaan di bidang penyebaran informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
3. Arah kebijakan melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan, sumberdaya, dan sistem informasi berbasis TIK.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Kota Palembang yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan Misi Walikota Palembang yang tercantum dalam RPJMD, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, maka disusun rencana Program, kegiatan dan Pendanaan yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah di dalam RPJMD 2024-2026. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan dan Program

Kode Perangkat Daerah : 2.16.2.21.2.20.01.0000

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terkait Informasi Pembangunan															
	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat dalam memperoleh Informasi Pembangunan														
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik	80 Indeks	80.5 Indeks	11.570.111.050,00	81.0 Indeks	12.727.122.155,00	81.5 Indeks	13.999.834.371,00	81.5 Indeks	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	82.5 Indeks	82.7 Indeks	11.570.111.050,00	82.9 Indeks	12.727.122.155,00	83.2 Indeks	13.999.834.371,00	83.2 Indeks	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengelolaan Komunikasi Publik	80 Persen	80.5 Persen	11.570.111.050,00	81.0 Persen	12.727.122.155,00	81.5 Persen	13.999.834.371,00	81.5 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik	80 Persen	80.5 Persen	11.570.111.050,00	81.0 Persen	12.727.122.155,00	81.5 Persen	13.999.834.371,00	81.5 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terwujudnya Smart Government															
	Terimplementasinya e-Government														
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Keamanan dan Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Statistik Daerah	90 Indeks	91 Indeks	9.080.847.000,00	92 Indeks	9.988.931.700,00	93 Indeks	10.987.824.870,00	93 Indeks	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2.66 Indeks	2.70 Indeks	9.080.847.000,00	2.74 Indeks	9.988.931.700,00	2.78 Indeks	10.987.824.870,00	2.78 Indeks	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengelolaan e-Government	53.2 Persen	53.8 Persen	9.080.847.000,00	54.4 Persen	9.988.931.700,00	55.0 Persen	10.987.824.870,00	55.0 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Publik												
			Terwujudnya Pelaksanaan Satu Data												
			Terwujudnya Smart Government												
			Terwujudnya Pelaksanaan Satu Data												
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												
				Persentase Penerapan Satu Data	0 %	20 %	3.227.319.000,00	40 %	3.550.050.900,00	60 %	3.905.055.990,00	60 %	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keamanan dan Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Statistik Daerah	48 Persen	49 Persen	3.227.319.000,00	50 Persen	3.550.050.900,00	51 Persen	3.905.055.990,00	51 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terwujudnya Smart Government															
	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Publik														
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.4.2	327 Indeks	329 Indeks	1.523.565.000,00	331 Indeks	1.675.921.500,00	333 Indeks	1.799.513.650,00	333 Indeks	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keamanan dan Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Statistik Daerah	90 Persen	91 Persen	1.523.565.000,00	92 Persen	1.675.921.500,00	93 Persen	1.799.513.650,00	93 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terwujudnya Pelayanan Prima															
	Terpenuhinya Kebutuhan atas Layanan Perangkat Daerah														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Kominfo Kota Palembang	75 Indeks	76 Indeks	15.534.669.871,00	77 Indeks	15.530.526.551,00	78 Indeks	17.179.068.837,00	78 Indeks	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Nilai SAKIP	BB Nilai	BB Nilai	14.014.300.375,00	BB Nilai	14.744.958.778,00	A Nilai	16.272.432.059,00	A Nilai	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	68.618.480,00	100 Persen	72.818.480,00	100 Persen	77.018.480,00	100 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	8.453.847.639,00	100 Persen	9.961.158.234,00	100 Persen	11.739.388.736,00	100 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan akan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	203.432.000,00	100 Persen	205.432.000,00	100 Persen	207.432.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan akan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.485.570.450,00	100 Persen	2.734.127.495,00	100 Persen	3.007.540.245,00	100 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan akan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	668.008.350,00	100 Persen	714.809.185,00	100 Persen	752.290.104,00	100 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan akan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.068.363.452,00	100 Persen	3.283.149.350,00	100 Persen	3.350.464.278,00	100 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan akan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	586.829.500,00	100 Persen	642.815.420,00	100 Persen	703.763.695,00	100 Persen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan capaian keluaran atau hasil yang diperoleh berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan program pembangunan pada RPJMD Kota Palembang Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari Instansi yang telah selaras dengan RPJMD akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi RPJMD Kota Palembang 2024-2026.

Gambar 7.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Opini dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	80 Indeks	80.5 Indeks 11.570.111050,00	810 Indeks 12.727.422.455,00	815 Indeks 13.999.834.371,00	815 Indeks 13.999.834.371,00	815 Indeks 13.999.834.371,00	815 Indeks 13.999.834.371,00			
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Keamanan dan Teknologi Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	90 Indeks	91 Indeks 9.080.847.000,00	92 Indeks 9.988.931700,00	93 Indeks 10.987.824.870,00	93 Indeks 10.987.824.870,00	93 Indeks 10.987.824.870,00	93 Indeks 10.987.824.870,00			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penerapan Satu Data	0%	20% 3.227.319.000,00	40% 3.550.050.900,00	60% 3.905.055.990,00	60% 3.905.055.990,00	60% 3.905.055.990,00	60% 3.905.055.990,00			
2.2102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.4.2	372 Indeks	329 Indeks 1.523.565.000,00	331 Indeks 1.675.921.500,00	333 Indeks 1.799.513.650,00	333 Indeks 1.799.513.650,00	333 Indeks 1.799.513.650,00	333 Indeks 1.799.513.650,00			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Kominfo Kota Nilai SAKIP	75 Indeks	76 Indeks 6.534.669.871,00	77 Indeks 6.530.526.551,00	78 Indeks 7.179.068.837,00	78 Indeks 7.179.068.837,00	78 Indeks 7.179.068.837,00	78 Indeks 7.179.068.837,00			
TOTAL:				40.936.511921,00	43.472.552.806,00	47.871.297.718,00	47.871.297.718,00	47.871.297.718,00	47.871.297.718,00			

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 2024-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan renstra Dinas Kominfo sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD 2024-2026 serta kinerja dan indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merujuk pada pencapaian indikator kinerja berdasarkan RPJMD sesuai dengan urusan komunikasi dan informatika. Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Urusan Komunikasi, Informatika, yang hendak dicapai pada periode 2024-2026. Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 2024-2026, diharapkan menjadi pedoman dan dapat di Implementasikan dalam rangka pencapaian dan mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang.